



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan-Jakarta Selatan
Call Center: 1500105, Laman: www.ahu.go.id, Pos-el: humas@ahu.go.id

Nomor : AHU-AH.01.29-05 9 Juli 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : satu berkas
Perihal : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Yth. (daftar terlampir)
di tempat

Dalam rangka penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kementerian Hukum perlu mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pada tanggal 9 Juli 2025, persentase pengesahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Papua Barat Daya baru mencapai 34%, sementara target pengesahan pada peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah 100%. Menindaklanjuti hal tersebut maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juli 2025
Semula Pukul : 09.00 WIT s.d. selesai
Menjadi Pukul : 13.00 WIT s.d. selesai
Tempat : Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Jl. Kurana No. 1 Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum,



Widodo

Tembusan:
Menteri Hukum Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum
Nomor : AHU-AH.01.29-05
Tanggal : 9 Juli 2025

**DAFTAR UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

1. Gubernur Papua Barat Daya;
2. Wakil Gubernur Papua Barat Daya;
3. Bupati Se Papua Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah Pemda Provinsi Papua Barat Daya;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua Barat;
6. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua Barat Daya;
7. Kepala Dinas Koperasi, UMK dan Perindustrian dan Koperasi Provinsi Papua Barat Daya;
8. Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat Daya;
9. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
10. Para Notaris se-Provinsi Papua Barat Daya;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya;
12. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya;
13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya.